

Pandangan Masyarakat Rantauprapat terhadap Kepemimpinan Wanita pada Masa Kepemimpinan Bupati Labuhanbatu Periode Februari 2025-Desember 2025

Salsabilla Azhara Ritonga ^{1*}, Hotmatua Paralihan Harahap ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Indonesia

Email : salsabilla0404221010@uinsu.ac.id ¹, hotmatuaparalihan@uinsu.ac.id ²

*Penulis Korespondensi : salsabilla0404221010@uinsu.ac.id

Abstract. *Women's leadership in local government continues to face gender stereotypes despite women having equal rights to hold public office. This study aims to analyze the perceptions of the people of Rantauprapat regarding women's leadership during the tenure of the Regent of Labuhanbatu from February to December 2025. This study employed a descriptive quantitative method through a survey of 100 respondents selected using purposive sampling. The results showed that the mean score of 3.511 fell into the agree category, indicating a positive public perception of women's leadership. The community perceived that women possess capabilities equal to those of men in government. Although patriarchal culture continues to exert influence, the legitimacy of leadership is increasingly determined by competence, quality, and performance rather than the gender of the leader. Future research could expand the scope of respondents and delve deeper into the relationships between societal characteristics, gender stereotypes, and assessments of female leaders' performance to gain a more comprehensive understanding of the acceptance of female leadership.*

Keywords: *Local Government; Public Perception; Rantauprapat; Regent of Labuhanbatu; Women's Leadership.*

Abstrak. Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah masih menghadapi stereotip gender meskipun memiliki hak yang sama dalam jabatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari–Desember 2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata 3,511 berada pada kategori setuju, yang mengindikasikan pandangan positif masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Masyarakat menilai perempuan memiliki kemampuan setara dengan laki-laki dalam pemerintahan. Meskipun budaya patriarki masih berpengaruh, legitimasi kepemimpinan semakin ditentukan oleh kompetensi, kualitas, dan kinerja, bukan jenis kelamin pemimpin. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden dan mendalami hubungan antara karakteristik sosial masyarakat, stereotip gender, serta penilaian terhadap kinerja pemimpin perempuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerimaan kepemimpinan perempuan.

Kata Kunci: Bupati Labuhanbatu; Kepemimpinan Perempuan; Pemerintahan Daerah; Persepsi Masyarakat; Rantauprapat.

1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan upaya pemerintahan karena hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan, mengelola sumber daya, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai hak istimewa kelompok tertentu, melainkan sebagai hak konstitusional setiap warga tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Komite tersebut juga diperkuat melalui Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang menegaskan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik dan pemerintahan.

Meskipun demikian, kesetaraan normative tidak selalu terlihat dalam keterwakilan perempuan di kehidupan publik. Menurut catatan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, per tahun 2025, terdapat 43 perempuan yang menjabat sebagai kepala negara di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah total kepala daerah di Indonesia, angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan kepala daerah masih relative rendah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi banyak tantangan dalam memperoleh legitimasi atau kesempatan untuk mendukung kolaborasi strategis di dalam pemerintahan.

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan gender yang sangat baik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara mencapai 91,50, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada di angka 72,45. Sebaliknya, Kabupaten Labuhanbatu memiliki IPG sebesar 91,38 dan IDG sebesar 68,63. IPG yang disebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berkembang di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi relative cukup signifikan. Namun, skor IDG yang masih di bawah pencapaian IPG menunjukkan bahwa partisipasi perempuan, khususnya dalam partai politik, pengambilan keputusan dan perwakilan strategis, masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, peningkatan kualitas hidup perempuan tidak selalu disertai dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Situasi ini juga berdampak pada tingkat keterwakilan perempuan di Lembaga legislative. Menurut data DPRD Provinsi Sumatera Utara, dari 1.124 anggota DPRD, hanya 131 di antaranya yang merupakan perempuan. Sementara itu, di DPRD Kabupaten Labuhanbatu, keterwakilan perempuan hanya berjumlah 3 orang. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di bidang legislatif masih relatif rendah, sehingga perempuan terus menghadapi tantangan dalam memperkuat posisi dan pengaruh mereka dalam proses perumusan kebijakan daerah. Rendahnya representansi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kesetaraan gender dalam politik belum sepenuhnya terwujud (*Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab_Kota dan Jenis Kelamin, 2025, n.d.*).

Stereotip gender yang meluas di masyarakat seringkali membuat posisi kepemimpinan kurang diminati oleh perempuan. Menurut penelitian Andajani, Hadiwirawan, dan Sokang (2016), kepemimpinan perempuan dalam kehidupan publik belum dipromosikan atau didukung dengan baik di Indonesia, dan masih ada stigma yang melekat terhadap pemimpin perempuan (Andajani et al., 2016; Khairani et al., 2026). Pemimpin perempuan secara umum lebih cenderung menciptakan lingkungan pengambilan keputusan kolaboratif. Proses ini melibatkan pengumpulan wawasan dari berbagai anggota tim, mendorong diskusi terbuka, dan memasukkan berbagai sudut pandang ke dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin kolaboratif sering memprioritaskan keselarasan tim, memastikan bahwa tujuan dan perspektif kolektif tercermin dalam keputusan mereka. Pengambilan keputusan yang berorientasi pada hubungan membantu membangun kepercayaan dan memperkuat loyalitas, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Kepekaan pemimpin perempuan terhadap dampak keputusan pada moral dan kesejahteraan tim memungkinkan mereka untuk menghadapi situasi kompleks dengan lebih efektif dan lebih hati-hati.

Perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari laki-laki, namun mereka tidak selalu terikat oleh stereotip tentang kefemininan atau kemaskulinan. Perempuan menggabungkan sifat-sifat feminin seperti sikap lembut, sistematis, intuisi, dan intuitif, dan peka terhadap orang lain, serta kemampuan multitasking yang menjadi kekhasan mereka. Di sisi lain, wanita juga mampu mengadopsi pendekatan maskulin saat diperlukan. Dalam kepemimpinan, perempuan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, partisipatif, dan transformasional dengan membangun jaringan dan mendorong keterlibatan berbagai pihak. Sebaliknya, pria cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transaksional yang mengutamakan komando, kendali, dan wewenang formal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan perempuan tidak inferior, melainkan memiliki karakteristik unik yang efektif dalam situasi tertentu.

Situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika kepemimpinan perempuan di Indonesia. Saat ini, sejumlah daerah telah dipimpin oleh bupati atau walikota perempuan yang mampu menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmorowati dkk. (2025) mengenai dua walikota perempuan di Jawa Timur, menunjukkan bahwa pemimpin perempuan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat. Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap keberagaman dalam

pemerintahan, tetapi juga mendorong terciptanya tata Kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif dan partisipatif.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji kepemimpinan perempuan, Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada partisipasi politik perempuan, gaya kepemimpinan, partisipasi politik perempuan, atau persepsi masyarakat dalam konteks pemilih kepala daerah. Sementara itu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah yang saat ini dipimpin oleh seorang bupati perempuan. Kondisi tersebut menjadi konteks yang penting untuk mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan setelah perempuan tersebut menjadi kepala daerah, karena penelitian yang berfokus pada pandangan masyarakat terhadap perempuan yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten Labuhanbatu masih relatif terbatas. Penelitian ini berfokus pada periode waktu Februari-Desember 2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan metodologis untuk menilai persepsi masyarakat pada tahap awal kepemimpinan (*early perfection*) serta menghindari variabel pengganggu dari periode berikutnya. Selain itu, banyak penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga masih diperlukan penelitian kuantitatif yang dapat memberikan bukti empiris mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan kesadaran masyarakat selama proses pemerintahan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), yang menjadi landasan penting dilaksanakan penelitian ini.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan merupakan kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan melalui proses mengarahkan, memengaruhi, mengoordinasikan, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perempuan dalam jabatan publik, tetapi juga menyangkut kemampuan dalam mengelola pemerintahan, membangun komunikasi, merumuskan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan fungsi kepemimpinan karena kemampuan memimpin tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh kompetensi, pengalaman, kualitas personal, dan kemampuan dalam mengelola organisasi. Kepemimpinan perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin terbuka, meskipun perempuan masih menghadapi berbagai hambatan berupa

stereotip gender dan stigma sosial dalam memperoleh posisi strategis (Malihah et al., 2024; Rayhan & Muksin, 2025).

Gaya Kepemimpinan Perempuan

Gaya kepemimpinan perempuan merupakan pola perilaku dan pendekatan yang digunakan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Perempuan dalam kepemimpinan dapat menerapkan gaya yang demokratis, partisipatif, kolaboratif, maupun transformasional dengan memberikan ruang kepada anggota organisasi dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi, membangun visi bersama, mendorong perubahan, serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dalam pemerintahan daerah, pendekatan tersebut penting karena pemimpin dituntut tidak hanya menjalankan kewenangan formal, tetapi juga mampu membangun kerja sama dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan perempuan dapat menjadi salah satu pendekatan yang mendukung terciptanya organisasi pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kinerja (Anggraeni et al., 2024).

Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Perempuan

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan merupakan proses penilaian masyarakat terhadap kemampuan, perilaku, kebijakan, dan kinerja perempuan ketika menjalankan suatu jabatan kepemimpinan. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui pengalaman masyarakat, informasi yang diterima, komunikasi politik, lingkungan sosial, serta hasil kerja yang ditunjukkan oleh pemimpin. Dalam konteks pemerintahan daerah, persepsi masyarakat menjadi penting karena penerimaan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator legitimasi sosial seorang pemimpin perempuan. Penilaian terhadap pemimpin perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, berkomunikasi dengan masyarakat, serta melaksanakan program dan kebijakan secara efektif (Nur Hibbah & Safitri, 2024).

Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Kesetaraan gender dalam kepemimpinan pemerintahan mengacu pada adanya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, berpartisipasi, serta menduduki posisi strategis dalam pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus memiliki pola kepemimpinan yang sama dengan laki-laki, tetapi memberikan kesempatan yang setara agar setiap individu dapat menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Dalam pemerintahan daerah, keterlibatan perempuan dalam jabatan kepemimpinan menjadi bagian penting dalam memperkuat

representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, budaya patriarki, stereotip gender, dan pandangan bahwa kepemimpinan lebih sesuai bagi laki-laki masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh posisi strategis pemerintahan (Andajani et al., 2016).

Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah merupakan keterlibatan perempuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemimpin laki-laki dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepemimpinan perempuan juga dapat memberikan perspektif yang beragam dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan melalui pendekatan komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan kompetensi, kualitas pengambilan keputusan, kemampuan membangun komunikasi, serta kinerja dalam melaksanakan program pembangunan daerah (Marhamah et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara objektif dan terukur mengenai pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari–Desember 2025. Data penelitian disajikan dalam bentuk angka yang kemudian diolah untuk mengetahui kecenderungan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel, melainkan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan hasil jawaban responden.

Metode penelitian ini dilaksanakan di Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi tersebut dipilih karena Rantauprapat merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sehingga masyarakat memiliki interaksi yang cukup tinggi dengan berbagai kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Rantauprapat, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdomisili di Rantauprapat, berusia minimal 17 tahun atau telah

memiliki hak pilih, mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu pada periode Februari–Desember 2025, dan bersedia menjadi responden penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam memperoleh data dari responden. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan mengenai kemampuan kepemimpinan, kompetensi, pengambilan keputusan, pelayanan masyarakat, kesetaraan gender, dan kinerja pemimpin perempuan dalam pemerintahan daerah. Jawaban responden kemudian diukur menggunakan skala penilaian dan dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata untuk mengetahui kategori pandangan masyarakat. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga memperhatikan etika penelitian dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada responden, memastikan partisipasi dilakukan secara sukarela, serta menjaga kerahasiaan identitas dan data yang diberikan. Data yang diperoleh digunakan khusus untuk kepentingan akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari 2025-Desember 2025. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

Tabel 1. Pedoman Nilai Mean.

Nilai Mean	Interpretasi
1,0 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
2,61 – 3,40	Cukup Setuju
3,41 - 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat setuju

Sumber: (Kolaboratif Sains et al., 2022)

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari–Desember 2025. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data penelitian melalui nilai total skor, rata-rata (*mean*), standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum yang diperoleh dari jawaban responden. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kecenderungan persepsi responden secara keseluruhan sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap setiap indikator penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Jumlah	10544
Mean Scor Total	105,3434343

Mean Per Butir	3,511447811
Standar Defiasi	14,00744391
Nilai Maksimum	144
Nilai Minimum	62

Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas diperoleh skor rata-rata (mean) sebesar 105,3434. Karena instrument penelitian terdiri dari 30 butir pernyataan, maka diperoleh rata-rata skor setiap butir sebesar:

$$\frac{105,3434}{30} = 3,511448$$

Nilai rata-rata sebesar 3,51 berada pada rentang interval 3,51 berada pada rentang interval 3,41-4,20, sehingga termasuk dalam kategori setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Rantauprapat memiliki pandangan yang positif terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari 2025-Desember 2025.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar responden menilai perempuan memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsi kepemimpinan daerah. Penilaian positif masyarakat tidak hanya didasarkan pada aspek jenis kelamin pemimpin, tetapi lebih kepada kemampuan dalam mengambil keputusan, menjalankan program pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta membangun komunikasi dengan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari 2025-Desember 2025 berada pada kategori setuju, dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,511448. Nilai tersebut berada pada interval 3,41-4,20 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Rantauprapat pada umumnya menerima kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal dan memandang bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Perubahan paradigma tentang kepemimpinan ditunjukkan oleh pandangan masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya. Dulu, kepemimpinan sering diasosiasikan dengan laki-laki karena faktor patriarki. Saat ini, publik lebih cenderung mengevaluasi kualitas pemimpin berdasarkan kompetensi, integritas, dan kemampuan mereka dalam menangani masalah publik dari pada berdasarkan jenis pendidikan mereka. Ini sejalan dengan beberapa penelitian yang mengklaim bahwa stereotip gender dalam kepemimpinan mulai menurun, meskipun tidak sepenuhnya dihilangkan (Malihah et al., 2024).

Perubahan ini dapat dipahami melalui Social Role Theory yang dikembangkan oleh Alice H. Eagly. Teori ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki dibentuk oleh interaksi sosial yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Secara tradisional, laki-laki dipandang sebagai sosok yang tegas, rasional, dan berorientasi pada tugas, sedangkan perempuan dipandang memiliki karakteristik yang empati, peka, dan berorientasi pada hubungan interpersonal. Dalam perkembangan masyarakat modern, pembagian peran tersebut mulai mengalami perubahan karena perempuan semakin terlibat dalam pendidikan, dunia kerja, dan bahkan politik. Akibatnya, masyarakat mulai mengevaluasi kepemimpinan berdasarkan kompetensi yang dimiliki saat ini, bukan berdasarkan stereotip gender (Eagly, 1987.) (Tanjung et al., 2025).

Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dapat diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat Rantauprapat mulai memiliki orientasi penilaian yang lebih rasional. Artinya, masyarakat tidak hanya tertarik untuk menentukan apakah pemimpin tersebut perempuan atau laki-laki, tetapi lebih memperhatikan kemampuan pemimpin dalam memberikan pelayanan publik, mengambil keputusan, dan menangani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Pergeseran orientasi tersebut merupakan salah satu indikator berkembangnya budaya politik yang lebih demokratis dan inklusif.

Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep Transformation Leadership yang dikembangkan oleh Bernard M. Bass. Kepemimpinan transformasional meningkatkan kemampuan seseorang pemimpin dalam membangun visi, menginspirasi orang lain, menumbuhkan kepercayaan, mendorong perubahan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat secara individual (Anggraeni et al., 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, kolaboratif, komunikatif, dan berfokus pada pemberdayaan. Karakteristik-karakteristik tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pemerintahan daerah yang membutuhkan kedekatan dengan masyarakat serta kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan publik secara kolaboratif (Salsabila et al., 2024).

Situasi ini dapat dijelaskan oleh persepsi positif masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan. Masyarakat cenderung menyadari bahwa keterampilan komunikasi, keterampilan interpersonal, kemampuan untuk menyuarakan aspirasi publik, serta kemampuan untuk menyuarakan aspirasi publik, serta kemampuan memecahkan masalah secara kooperasi merupakan karakteristik yang diperlukan dalam pemerintahan daerah. Akibatnya, penerimaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh identitas pemimpin sebagai

perempuan, tetapi juga oleh cara kepemimpinan tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lusiana (2025), yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan pada pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan kepada perempuan sebagai pemimpin apabila ia mampu menunjukkan keterampilan komunikasi politik yang efektif, visi kepemimpinan yang jelas, dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah sosial. Akibatnya, gender tidak lagi menjadi faktor dominan dalam proses pembentukan legitimasi politik, melainkan gender (Lestari et al., 2025).

Penelitian ini juga mendukung temuan penelitian Nur Hibbah dan Safitri (2024), yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan semakin positif seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di pemerintah. Masyarakat mulai memahami bahwa perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam hal berpartisipasi dalam pekerjaan publik, sekaligus mampu memenuhi standar profesionalisme dan akuntabilitas pemerintah (Nur Hibbah & Desi Safitri, 2024).

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori transformasional. Pemimpin perempuan umumnya memiliki kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang positif, komunikasi yang lebih partisipatif, serta kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Karakteristik-karakteristik ini dapat meningkatkan kepercayaan publik sehingga masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian mengenai komunikasi politik di kalangan perempuan juga menunjukkan bahwa komunikasi yang inklusif merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun legitimasi kepemimpinan perempuan di tingkat tertinggi (Adawiyah & Ginting, 2024).

Lebih lanjut, Penelitian yang dilakukan oleh Marhamah dkk. (2025) mengenai kepemimpinan perempuan dalam organisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih partisipatif, meningkatkan komunikasi internal, dan memperkuat kerja sama tim. Karakteristik ini mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Hasil-hasil yang disebut di atas sejalan dengan penelitian ini, di mana masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap kepemimpinan perempuan karena mereka mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien (Marhamah et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki yang saat ini berlaku merupakan hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sebelum terjadi perubahan. Meskipun nilai-nilai patriarki masih mendominasi masyarakat Indonesia, kemajuan di bidang Pendidikan, demokrasi, dan partisipasi politik perempuan telah membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang kepemimpinan perempuan. Pergeseran yang disebut di atas membuat masyarakat menjadi lebih rasional dalam mengevaluasi seorang pemimpin berdasarkan hasil kerja dan kualitas kepemimpinannya, dibandingkan berdasarkan jenis kelamin (Surahman & Munadi, 2022).

Namun demikian, hasil penelitian yang berada pada kategori setuju dan belum mencapai kategori sangat setuju menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan belum berada pada tingkat yang optimal. Skor rata-rata sebesar 3,511 menunjukkan bahwa masih ada sejumlah responden yang memberikan jawaban netral atau kurang setuju. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagai masyarakat, kita masih dipengaruhi oleh keyakinan tradisional yang memandang laki-laki sebagai sosok yang lebih cocok untuk menduduki posisi kekuasaan.

Keberadaan kelompok masyarakat yang masih memiliki persepsi seperti itu mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, budaya patriarki yang telah berkembang secara turun-temurun, sehingga membentuk persepsi tentang bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya diperlakukan. Kedua, pengalaman politik masyarakat umum yang masih relatif terbatas terkait kepemimpinan perempuan di tingkat daerah. Ketiga, proses perubahan sosial yang terjadi secara bertahap sehingga perubahan dalam persepsi masyarakat tidak terjadi, secara sistematis di semua lapisan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pergeseran persepsi mengenai kepemimpinan perempuan merupakan proses sosial yang membutuhkan waktu dan dipengaruhi oleh kondisi budaya, Pendidikan, serta pengalaman masyarakat.

Dari perspektif demokrasi lokal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Rantauprapat memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip meritokrasi. Meritokrasi berarti bahwa legitimasi seseorang ditentukan oleh kemampuan, integritas, prestasi, dan kualitas kepemimpinannya, bukan oleh identitas sosialnya, seperti gender. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mulai mengambil sikap yang lebih objektif terhadap para pemimpin daerah. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dilegitimasi secara politik karena mereka mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas tinggi.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Rantauprapat memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Bupati Labuhanbatu pada periode Februari–Desember 2025, beberapa responden tetap menyampaikan adanya kritik terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan kondisi jalan di beberapa wilayah, pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta belum optimalnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak sepenuhnya homogen, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi wilayah tempat tinggal masing-masing.

Namun demikian, kritik tersebut perlu dipahami dalam konteks masa awal pemerintahan. Pada periode Februari hingga Desember 2025, pemerintah daerah masih berada pada tahap konsolidasi kebijakan, penyusunan arah pembangunan melalui RPJMD 2025–2029, serta penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, belum seluruh program prioritas dapat direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini merupakan tantangan yang lazim dihadapi oleh pemerintahan baru, khususnya ketika kebutuhan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendanaan daerah.

Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan komitmen untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, yang tercermin dalam perencanaan pembangunan jalan, jembatan, jaringan drainase, serta peningkatan akses infrastruktur di wilayah pesisir dan pedesaan. Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kritik yang berkembang, melainkan berupaya menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan pada periode berikutnya.

Oleh karena itu, kritik terhadap pembangunan infrastruktur lebih tepat dipandang sebagai bentuk evaluasi publik terhadap kecepatan implementasi program, bukan sebagai indikator kegagalan kepemimpinan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat masih menemukan beberapa kekurangan dalam aspek pembangunan fisik, penilaian terhadap kepemimpinan Bupati Labuhanbatu tetap cenderung positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya menilai kinerja pemerintah berdasarkan hasil pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga mempertimbangkan komitmen, arah kebijakan, serta upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kritik justru memperlihatkan adanya ruang evaluasi yang dapat menjadi dasar bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan

datang, tanpa mengubah kecenderungan umum bahwa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu dipersepsikan positif oleh mayoritas responden penelitian.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Rantauprapat terhadap kepemimpinan perempuan pada masa kepemimpinan Bupati Labuhanbatu periode Februari–Desember 2025 berada pada kategori positif dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,511 yang termasuk dalam kategori setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pelayanan publik, dan komunikasi dengan masyarakat. Temuan ini juga mengindikasikan adanya pergeseran paradigma masyarakat yang semakin menilai pemimpin berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan jenis kelamin. Meskipun masih terdapat sebagian responden yang memberikan penilaian netral serta menyampaikan kritik terhadap pembangunan infrastruktur, hal tersebut lebih merupakan evaluasi terhadap implementasi program pada masa awal pemerintahan. Secara keseluruhan, kepemimpinan perempuan memperoleh legitimasi positif dari masyarakat, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi dan profesionalisme menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E., & Ginting, R. (2024). Patterns, Channels, and Effects of Political Communication in Women's Regional Leadership. *Persepsi: Communication Journal*, 7(2), 95–108.
- Andajani, S., Hadiwirawan, O., & Sokang, Y. A. (2016). Women's Leaderships in Indonesia : Current Discussion, Barriers, and Existing Stigma. *Indonesian Feminist*, 4(1), 101–111.
- Anggraeni, D., Quintania, M., & Pratomo, W. B. (2024). Kepemimpinan Transformasional di Era 4.0 dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.32502/jimn.v14i1.1328>
- citation-13814860. (n.d.).
- Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab_Kota dan Jenis Kelamin, 2025. (n.d.).
- Kolaboratif Sains, J., Yusuf Husen, M., Kuswani Waty, T., Parmita, R., Kuswani Wati, T., & Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, S. (2022). Pengaruh Motivasi dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Mitra Grab di Kota Palu *The Influence of Motivation and Organizational Climate on the Performance of Grab Partners in Palu City*. 05, 729–738.
- Lestari, N. A., Kurniawan, N. W., & Purnawati, L. (2025). Persepsi Masyarakat Dalam Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024) *Public*

Perception in Women 's Leadership (East Java Governor Election Study 2024). 18(01), 44–56.

- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>
- Marhamah, F. S., Dewi, I. M., Nurhaliza, T. A., Putri, M. M., & Selfiana, S. (2025). Peran Kepemimpinan Wanita pada Organisasi Perangkat Daerah dalam Mendukung Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 11–24. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.85422>
- Nur Hibbah, & Desi Safitri. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender di Mandailing Natal. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 192–201. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1438>
- Salsabila, E. N., Fitri, N., Putri, R., & Wildan, M. A. (2024). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 727–739. <https://al-haramjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/6392>
- Surahman, S., & Munadi, M. (2022). Kepemimpinan Perempuan Di Perguruan Tinggi: Manajerial Atau Akademik. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 7(1), 18–26. <https://doi.org/10.34125/kp.v7i1.662>
- Tanjung, S. F., Rusadi, N. A., Puteri, K. R., & Alif, M. I. (2025). Analisis Kepemimpinan Perempuan di Indonesia Menggunakan Metode Bibliometrik. *Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 85–95. <https://doi.org/10.30743/jmb.v7i1.10538>
- Khairani, F., et al. (2026). Kepemimpinan transformasional perempuan dalam institusi pendidikan: Sebuah systematic literature review. *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 4(2). <https://doi.org/10.61132/observasi.v4i2.2190>
- Rayhan, A., & Muksin, N. N. (2025). Manajemen public relations dalam mengelola reputasi pada organisasi PERHUMAS. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/filosofi.v2i2.608>